



STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU



**RENCANA KERJA TAHUNAN
TA. 2026**

KATA PENGANTAR

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023 adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d) pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Adapun upaya yang dilakukan oleh Stasiun PPMHKP Baubau untuk mewujudkan fungsi tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen rencana kinerja tahunan (RKT). RKT Stasiun PPMHKP Baubau Tahun 2026 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang akan direncanakan akan dicapai Stasiun KIPM Baubau pada tahun anggaran 2026 .

Demikian RKT Stasiun KIPM Baubau Tahun 2026 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Baubau, 5 Januari 2026

Kepala, Stasiun KIPM Baubau



Yuni Irawati Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman	
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Ikhtisar Eksekutif		iii
BAB I . PENDAHULUAN		1
A. Arah Kebijakan		1
B. Keterkaitan RKT dengan Renstra		5
BAB II. RENCANA KINERJA TAHUN 2026		7
A. Tujuan Strategis		7
B. Sasaran Strategis dan IKU serta Target		8
BAB III. PENUTUP		13
LAMPIRAN		

IKHTISAR EKSEKUTIF

Stasiun PPMHKP Baubau merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai andil dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Negara Indonesia, terutama dalam memberikan jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan. Adapun misinya yaitu “ **Hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman dan terpercaya**”

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025, Stasiun PPMHKP Baubau merupakan Unit Pelaksana Teknis **Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)** dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Serta secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tugas pokok Stasiun PPMHKP Baubau adalah menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan adanya keterkaitan antara Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Stasiun PPMHKP Baubau Tahun 2025 – 2029, yaitu berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, dan visi organisasi.

Rencana Kinerja Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Baubau terdiri sebagai berikut ; **Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (3989) dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP (3987), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) meliputi :**

Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	71
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Stasiun PPMHKP Baubau	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)	82,5
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	77
		6.	ilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	86,2
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Persen)	86
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	92,1
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	71,75
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	77
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)	3.5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	101.100.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	4.249.658.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Baubau Tahun 2026		4.350.758.000

Target Kinerja adalah keluaran dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun tersebut. untuk lebih rincinya disajikan dalam Formulir dan Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 diatas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Arah Kebijakan

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Pembangunan kelautan dan perikanan pada RKP Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui swasembada pangan berbasis sumber daya akuatik (blue food) dan swasembada garam serta mendorong transformasi ekonomi biru sebagai salah satu sumbu utama kemandirian bangsa. Kebijakan ini sejalan dengan tema RKP Tahun 2026 yaitu “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”, yang merupakan penjabaran dari tema RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

RKP Tahun 2026 diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk mewujudkan (1) pertumbuhan tinggi berkelanjutan meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20 - 5,50 persen, peningkatan Gross National Income (GNI) per kapita hingga 5.550 USD, penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi 37,14 persen dan peningkatan Indeks kualitas Lingkungan Hidup ke angka 72,67; (2) penurunan kemiskinan meliputi penurunan tingkat kemiskinan ke 6,0 - 7,0 persen, kemiskinan ekstrem sebesar 0,5 persen, rasio gini sebesar 0,377-0,380, dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,44-4,86 persen; (3) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditandai dengan kenaikan Indeks Modal Manusia ke angka 0,57, proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,5 persen. Selain itu, RKP Tahun 2026 juga diarahkan untuk mencapai Indikator Pembangunan Tahun 2026, Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 106-108.

Asta Cita merupakan visi dan misi utama yang menjadi pondasi arah pembangunan nasional dan diintegrasikan ke dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2026 untuk mendukung pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2026–2045 dan RPJMN 2026–2029 terdiri atas: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sektor kelautan dan perikanan menjadi kontributor utama pada PN (2) terkait swasembada pangan dan ekonomi biru, PN (4) terkait pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan dan pemuda, PN (5) khususnya hilirisasi dan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, dan PN (8) terkait penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, serta mendukung PN lainnya terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi, vokasi dan produktivitas tenaga kerja, kemandirian desa, reformasi sistem jaminan sosial, serta reformasi hukum.

Sejalan dengan itu, arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2026 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagai pijakan utama arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian ekosistem laut, yang diwujudkan melalui 5 (lima) arah kebijakan, yaitu:

- 1) memperluas kawasan konservasi laut;
- 2) penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota;
- 3) pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;

- 4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- 5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut diimplementasikan melalui kegiatan yang merupakan :

1. Penugasan Yang Menjadi Program Prioritas Presiden :
2. Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional
 - Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)
 - Pengembangan Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS), Modelling Budi Daya Rumput Laut, dan Komoditas Unggulan Tematik Lainnya.
 - Revitalisasi Peralatan Laboratorium Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan.
3. Proyek Strategis Nasional (PSN)
4. Proyek yang Dibiayai Dengan Menggunakan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
5. Proyek yang Dibiayai Dengan Menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Tugas pokok Stasiun PPMHKP Baubau adalah Unit Pelaksana Teknis Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;

- c. pelaksanaan surveilans, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilans, pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan;
- e. pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi;
- g. pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi Stasiun PPMHKP Baubau ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan

Stasiun PPMHKP Baubau dipimpin oleh seorang kepala merupakan unsur pelaksana teknis pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Kantor
- b. Kelompok Jabatan Fungsional, yang membantu sebagai Ketua Tim Kerja yaitu sebagai berikut :

1. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Produksi Primer
2. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Produksi Pasca Panen
3. Dukungan Manajerial
4. Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten Sesuai Standar.

B. Keterkaitan RKT dan Renstra

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja yaitu berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi organisasi. Rencana Strategis merupakan rencana unggulan suatu organisasi yang akan dilakukan dan dicapai selama 5 tahun kedepan. Keterkaitan antara keduanya bahwa rencana kinerja tahunan merupakan pelaksanaan dari rencana strategis tersebut Stasiun PPMHKP Baubau. Stasiun PPMHKP Baubau menjabarkan dalam rencana kinerja tahun 2026 sebagai berikut ; **Dukungan Manajemen Internal lingkup BPPMHKP (3987)**, dan **Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan (3989)**

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Tujuan Strategis

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, yaitu berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi organisasi. Beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut;

1. Kegiatan yang akan dilakukan akan berhasil baik bila direncanakan dengan baik dan matang ;
2. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga ;
3. Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan acuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
4. Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan pembanding dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Stasiun PPMHKP Kelas Baubau mengemban misi sebagai berikut:

- Melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan;
- Mendukung pengembangan teknik dan metoda pengendalian mutu hasil perikanan;
- Mendukung pengembangan sistem informasi mutu hasil perikanan;
- Menegakkan supremasi hukum terhadap peraturan perundangan mutu hasil perikanan;
- Mengembangkan sistem administrasi perkantoran;

Tujuan adalah implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui sertifikasi

2. Mengembangkan teknik dan sistem pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan
3. Meningkatkan pelayanan sertifikasi mutu melalui pemanfaatan sistem informasi
4. Meningkatkan pengawasan operasional pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan di Unit Pengelolaan Ikan
5. Meningkatkan peran serta pengguna jasa dalam pelaksanaan pengawasan mutu hasil perikanan
6. Mengembangkan pengelolaan administrasi di Stasiun PPMHKP Baubau.

B. Sasaran Strategis dan IKU Serta Target

Dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan Stasiun PPMHKP Baubau yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka harus ada kesepahaman definisi program, hasil (outcome), kegiatan, dan keluaran (output) untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 dijelaskan sebagai berikut :

1. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi. Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi ini eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (output) dengan indikator kinerja terukur. Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2026 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagai pijakan utama arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian ekosistem laut, yang diwujudkan melalui 5 (lima) arah kebijakan, yaitu:

- 1) memperluas kawasan konservasi laut;
- 2) penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota;

- 3) pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
- 4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- 5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan

Pada tahun 2026, KKP dalam hal ini Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berkomitmen untuk melakukan revitalisasi peralatan laboratorium guna menjamin kualitas dan keamanan produk hasil kelautan dan perikanan. Revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas laboratorium dalam melakukan pengujian dan analisis, sehingga mampu memenuhi standar nasional dan internasional. Dengan peralatan yang terkini, laboratorium dapat menyediakan hasil pengujian yang lebih cepat, akurat, dan terpercaya. Capaian yang diharapkan meliputi:

1. peningkatan kapasitas pengujian setiap laboratorium akan mampu meningkatkan jumlah pengujian yang dilakukan dalam satu bulan.
2. pengurangan waktu pengujian revitalisasi diharapkan dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan laporan pengujian produk.
3. standardisasi sistem pengujian laboratorium akan menerapkan standar pengujian yang konsisten, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
4. peningkatan kepercayaan pengguna jasa hasil pengujian yang akurat dan tepat waktu, seperti yang diharapkan pengguna jasa.

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.

3. Hasil (Outcome)

Hasil (Outcome) adalah prestasi kerja yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan dalam satu program.

4. Keluaran (*Output*)

Keluaran (*Output*) adalah prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program serta kebijakan.

Melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat dicapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Stasiun PPMHKP Baubau pada tahun anggaran 2025 secara lengkap dapat dilihat pada Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Stasiun PPMHKP Baubau Tahun 2025 – 2029, yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 dan merupakan dokumen utama sebelum dilaksanakan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga Tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang:

- (1) Program yang dijalankan pada tahun yang bersangkutan,
- (2) Kegiatan yang akan dijalankan,
- (3) Indikator Kegiatan yang akan di capai,
- (4) Uraian Sub Kegiatan dan Pelaksanaan Pekerjaan,
- (5) Lokasi Pelaksanaan Kegiatan,
- (6) Target Kinerja yang akan di capai

Target Kinerja adalah keluaran dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun tersebut untuk lebih rincinya disajikan dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Indikator Kinerja Utama meliputi :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	71
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Stasiun PPMHKP Baubau	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)	82,5
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	77
		6.	ilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	86,2
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Persen)	86
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	92,1
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	71,75
		10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	77
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)	3.5

Data Anggaran 2026

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	101.100.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	4.249.658.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Baubau Tahun 2026		4.350.758.000

Dari sasaran program dan indikator kerja utama (IKU) tersebut di jabarkan lagi ke dalam sasaran kegiatan dan **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)
	2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)
Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Stasiun PPMHKP Baubau	4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)
	5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)
	6	ilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)
	7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Persen)
	8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)
	9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)
	10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)
	11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)

BAB III

PENUTUP

Tugas pokok Stasiun PPMHKP Baubau adalah menyelenggarakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, yaitu berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, dan visi organisasi. Beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut ;

1. Kegiatan yang akan dilakukan akan berhasil baik bila direncanakan dengan baik dan matang ;
2. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga ;
3. Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan acuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
4. Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan pembanding dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan Stasiun PPMHKP Baubau yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran melalui penetapan program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Stasiun PPMHKP Baubau pada tahun anggaran 2026 secara lengkap dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Stasiun PPMHKP Baubau Tahun 2025 – 2029, yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 dan merupakan dokumen utama sebelum dilaksanakan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga Tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang: (1) Program yang dijalankan pada tahun yang bersangkutan,

(2) Aktivitas yang akan dilaksanakan (3) Kerangka Rician Output yang akan di jalankan, (3) Rincian Output yang akan di capai, (4) Komponen dan Sub Komponen yang akan dikerjakan, (5) Detail pekerjaan untuk mencapai output, (6) Lokasi Pelaksanaan Kegiatan, (7). Target Kinerja yang akan dicapai

Target Kinerja adalah keluaran dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun tersebut untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyusun RKA-KL Tahun 2026 dan melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2026. Sehingga semua program dan kegiatan yang telah direncanakan ditahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan sasaran strategis secara efektif dan efisien..



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN BAUBAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yuni Irawati Wijaya**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ishartini

**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Baubau



Yuni Irawati Wijaya

**Ditandatangani
Secara Elektronik**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN BAUBAU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	72
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	3.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Baubau	4.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)	82,5
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	77
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	86,2
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Persen)	86
		8.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	92,1
		9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Nilai)	71,75
		10.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (%)	77
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Baubau (Indeks)	3.5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	101.100.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	4.249.658.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Baubau Tahun 2026		4.350.758.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Baubau



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Yuni Irawati Wijaya